

**PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREKRUTAN DAN
PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022
(Studi Kasus Polda Lampung).**

Oleh

YULIUS OKTABER

Kejahatan Tindak Pidana perdagangan orang dalam bentuk Perekutan, dan Pengiriman pekerja migran Indonesia secara Non-prosedural di Provinsi Lampung tahun 2022 jumlah kasusnya semakin meningkat. Berdasarkan data yang tercatat di Kepolisian Polda Lampung tahun 2022, mayoritas masyarakat yang menjadi korban perekutan PMI secara Non-Prosedural dari kalangan perempuan serta anak-anak di bawah umur. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban yang telah di rekrut secara Non-Prosedural di butuhkan peran Penyidik Kepolisian Polda Lampung dalam penegakan hukumnya. Permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu, Bagaimana Peran Penyidik Kepolisian Polda Lampung dalam penegakan hukum tindak pidana perekutan dan pengiriman pekerja migran Non-Prosedural di Provinsi Lampung tahun 2022? Apakah faktor penghambat Penyidikan tindak Pidana Perekutan dan pengiriman pekerja migran Non-prosedural asal Lampung tahun 2022?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif dan Empiris, dengan mengkaji dan menganalisis ke-efektifan peraturan Undang-Undang yang berlaku di kaitkan dengan fakta yang di peroleh dari studi lapangan serta pemecahan masalah dengan teori peran dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian yang di peroleh dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 jumlah kasus perekutan dan pengiriman PMI Non-Prosedural di Provinsi Lampung semakin meningkat, salah satu penyebabnya adalah faktor minimnya peluang kerja diprovinsi Lampung, mudahnya pembuatan Paspor liburan, serta lemahnya pemeriksaan lintas batas oleh pihak Imigrasi sehingga calon pekerja Migran memilih jalan pintas bekerja secara Non-prosedural ke luar negeri untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarganya. Dengan adanya peningkatan jumlah kasus tersebut Penyidik Kepolisian Polda Lampung berperan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan peristiwa pidananya serta menegakkan hukum terhadap pelaku perekut Non-Prosedural agar mendapat sangsi berdasarkan ketentuan UU Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan pekerja migran Indonesia.

Kesimpulan Penelitian bahwa Penyidik Kepolisian memiliki peran dalam penegakan hukum TPPO di antaranya Peran Normatif , peran ideal, peran faktual dalam bentuk upaya Pre-emptif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Faktor penghambat penyidikan berupa faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya anggaran proses penyidikan, dan faktor masyarakat yang enggan melaporkan adanya kasus TPPO kepada Pihak Kepolisian. Saran atas penelitian ini terkait peran penyidik kepolisian dalam menyidik perkara TPPO kedepan hendaknya jumlah personil yang menangani perkara TPPO di Prov Lampung ditambah jumlahnya mengingat selalu terjadi peningkatan kasusnya serta pihak Penyidik Kepolisian harus bekerjasama dengan Imigrasi, BP2MI, Dinas Tenaga Provinci Lampung dalam meningkatkan pengawasan keluar masuknya orang baik kedalam ataupun keluar negeri untuk mencegah terjadinya TPPO.

Kata kunci: Peran, Penyidik, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Non-prosedural.

**THE ROLE OF INVESTIGATORS IN LAW ENFORCEMENT OF THE CRIME OF RECRUITMENT AND DELIVERY OF NON-PROCEDURAL MIGRANT WORKERS IN LAMPUNG PROVINCE IN 2022
(Case Study of Polda Lampung).**

By

YULIUS OKTABER

The crime of trafficking in persons in the form of recruiting and sending Indonesian migrant workers non-procedurally in Lampung Province in 2022 will increase the number of cases. Based on data recorded at the Lampung Regional Police in 2022, the majority of people who are victims of PMI's non-procedural recruitment are women and minors. One form of legal protection for victims who have been recruited non-procedurally requires the role of the Lampung Police Investigator in law enforcement. The problem in writing this thesis is, What is the Role of Police Investigators from the Lampung Regional Police in enforcing the criminal law on the recruitment and sending of Non-Procedural migrant workers in Lampung Province in 2022? What are the inhibiting factors Investigation of Criminal Acts Recruitment and dispatch of Non-procedural migrant workers from Lampung in 2022?

This type of research is a qualitative research using a normative and empirical juridical approach, by studying and analyzing the effectiveness of applicable laws and regulations in relation to the facts obtained from field studies and solving problems using role theory and law enforcement theory. The research results obtained from 2021 to 2022 the number of cases of recruitment and sending of PMI Non-Procedural in Lampung Province is increasing, one of the reasons is the lack of job opportunities in Lampung province,Keywords: Role, Investigator, Trafficking in Persons, Non-procedural the ease of making vacation passports, as well as the weak cross-border inspection by the Immigration so that prospective Migrant workers choose shortcuts to work non-procedurally abroad to meet the economic demands of their families. With the increase in the number of cases, Lampung Police Investigators play a role in carrying out investigations and investigations to find criminal events and enforce the law against non-procedural recruiters in order to receive sanctions based on the provisions of Law Number 21 of 2017 concerning eradicating criminal acts of trafficking in persons and Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers.

Research conclusions that Police Investigators have a role in enforcing TIP law including Normative Roles, ideal roles, factual roles in the form of Pre-emptive efforts, Preventive Efforts and Repressive Efforts. And the inhibiting factors for the investigation are in the form of legal substance factors, law enforcement factors, limited facilities and infrastructure, limited budget for the investigation process, and community factors that are reluctant to report TIP cases to the Police. Suggestions for this research are related to the role of police investigators in investigating TIP cases in the future, the number of personnel handling TIP cases in Lampung Province should be increased considering that there is always an increase in cases and the Police Investigators must cooperate with Immigration, BP2MI, the Lampung Provincial Energy Service in increasing supervision of entry and exit. people both inside and outside the country to prevent TIP.

Keywords: Role, Investigator, Trafficking in Persons, Non-procedural.